

STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MARITIM MENGHADAPI GLOBALISASI

INDONESIA'S DEEP MARINE DEFENSE STRATEGY MARITIME'S PERSPECTIVE FACING GLOBALIZATION

Rohman Saleh Arto¹, Lukman Yudho Prakoso²,
Dohar Sianturi³

Program Studi Strategi Pertahanan Laut, UNIVERSITAS PERTAHANAN
(rohmansaleh78@gmail.com)

Abstrak - Arus perkembangan globalisasi saat ini jelas memberikan ruang gerak yang semakin bebas bagi berbagai ancaman yang datang untuk masuk dan mengganggu keamanan nasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar tidak boleh menutup mata terhadap ancaman yang dapat masuk melalui jalur-jalur perairan strategisnya, dengan luas total perairan Indonesia sebesar 6,4 juta km² di antaranya seluas 3,1 juta km² berupa perairan pedalaman dan perairan kepulauan, 3 juta km² berupa Zona Ekonomi Eksklusif dan 290 ribu km² adalah laut teritorial. Perkembangan ekonomi Indonesia dan kawasan regional memberikan efek pada keamanan nasional, termasuk sektor keamanan maritim. Indonesia memiliki tantangan untuk mengelola keamanan maritim dengan berbagai dimensi termasuk perspektif pertahanan dan keamanan. Peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan maritim menjadi kunci bagi pemerintah untuk terus mengawal langkah Indonesia kedepan dalam menghadapi rangkaian perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala regional maupun global. Indonesia sebagai negara maritim berdaulat atas wilayah yurisdiksi dan disegani bangsa lain serta memanfaatkan geostrategi negara lain di kawasan Asia Pasifik, dimana laut merupakan sebagai bagian integral untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Kata Kunci: Globalisasi, Maritim, Perspektif, Pertahanan, Strategi.

ABSTRACT - The current development of globalization clearly provides an increasingly free space for various threats that come to enter and disrupt national security. Indonesia, which is the largest archipelagic country, must not turn a blind eye to threats that can enter through its strategic waterways, with a total area of 6.4 million km² of Indonesian waters of which 3.1 million km² are inland waters and archipelagic waters, 3 million km² is the Exclusive Economic Zone and 290 thousand km² is the territorial sea. The economic development of Indonesia and the regional area has an effect on national security, including the maritime security sector. Indonesia has challenges in managing maritime security with various dimensions including a defense and security perspective. Increasing the capacity of maritime defense forces is the key for the government to continue to oversee Indonesia's future steps in facing a series of changes in the strategic environment, both on a regional and global scale. Indonesia as a sovereign maritime country over jurisdiction and respected by other nations and utilizing the geostrategy of other countries in the Asia Pacific region, where the sea is an integral part of the Sustainable Development Goals.

Keywords: Globalization, Maritime, Perspective, Defense, Strategy.

¹Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelagic state* terbesar di dunia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta menghubungkan dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas perairan, laut teritorial dan perairan pedalaman, lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi, maka total luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Luas total perairan Indonesia sebesar 6,4 juta km² di antaranya seluas 3,1 juta km² berupa perairan pedalaman dan perairan kepulauan, 3 juta km² berupa Zona Ekonomi Eksklusif dan 290 ribu km² adalah laut teritorial. (Sumber: Badan Informasi Geospasial/ BIG dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL).⁴ Wilayah laut seluas itu tentu saja menjadi sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya perikanan maupun sumber daya dari dasar lautan. Bangsa Indonesia tentu saja

berpeluang besar untuk menjadikan laut sebagai sumber penting bagi aktivitas ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Ia memiliki sekitar 13.000 gugusan pulau dengan garis panjang pantai kurang lebih 99.093 km, yang juga merupakan terpanjang di dunia.⁵ Dengan posisi yang sangat strategis tersebut, menjadikan wilayah perairan Indonesia dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari banyak negara, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut dari berbagai negara di belahan dunia. Sementara itu, hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Dalam kaitan kepentingan nasional itulah, bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang (*space consciousness*) dan kesadaran geografis (*geographical awareness*) sebagai Negara

⁴Effatha Gloria V.G. Tamburian, 'Dharma Samudera Dalam Perspektif Maritim di Era Globalisasi', dalam <https://www.gesuri.id/analisis/dharma-samudera-dalam-perspektif-maritim-di-era-globalisasi-b1VY4Zhnn>, 15 Januari 2019, diakses pada 30 November 2020.

⁵Harmoko Darto, 'The Potpourri of Regional History: Tracing the History of Maritime History on the North Coast of Central Java', 2016, hlm. 9.

kepulauan. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman etnis, perwujudan nasionalismenya banyak diwarnai oleh permasalahan politik, ekonomi dan etnisitas serta agama, sehingga berbagai permasalahan tersebut menjadi sulit diselesaikan secara tuntas tanpa melihat dan menghubungkan keterkaitan antara dinamika global dan regional.⁶ Menyikapi Hal ini logis dan sangat mendasar mengingat, di satu sisi, posisi geografis yang strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam, merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun di sisi lain, posisi geografis yang menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara ini, mengandung pula kerawanan dan kerentanan karena pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan Negara. Penegakan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan

konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan, merupakan program-program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim guna menangkal adanya ancaman. Secara konseptual, pembangunan pertahanan maritim negara dapat dibangun dengan mengacu pada kerangka pertahanan, yakni *ends, means, dan ways*, dimana *ends* untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh, sedangkan *means* membentuk sea power yang kuat, dan *ways* melaksanakan *sea control* dan *power projection ashore*. Untuk mewujudkan hal ini juga diperlukan koordinasi yang kuat antara instansi yang terlibat. Masing-masing instansi tersebut tentunya perlu ditanamkan persepsi “doktrin pertahanan maritim” yang sama, yaitu menggaris bawahi peran secara bersama-sama dan menyeluruh untuk mensinergikan kekuatan maritim. Argumennya adalah aspek teknologi yang global strategis, Elemen kembar dari transformasi itu adalah kemajuan teknologi, dan difusi teknologi maju.

⁶Bambang Wahyudi, ‘Kepemimpinan Nasional Dalam Perkembangan Lingkungan Strategis’, *Palar | Pakuan Law Review*, 4.2 (2018), hlm. 327.

Lingkungan adalah bagian dari proses selama berabad-abad transformasi. Doktrin pertahanan maritim melihat beberapa aspek seperti sejarah dan lingkungan maritim, kebijakan strategis pertahanan, konsep operasional maritim, luas wilayah operasi, instrumen kekuatan tempur, dan penyelenggaraan kampanye militer yang profesional. Visi ini mengasumsikan suatu kondisi di mana kekuatan geopolitik ekonomi tengah bergeser dari Dunia Barat ke Asia, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan posisi globalnya. Visi ini mengemuka di tengah-tengah semakin menguatnya konsensus politik di dalam negeri bahwa Indonesia tengah mengalami ancaman keamanan eksternal yang semakin serius, terutama mengingat tren militerisasi baik di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, perselisihan yang terjadi antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara di Laut China Selatan, dan kemungkinan klaim China terhadap perairan di sekitar kepulauan Natuna. Disamping tantangan dalam aspek teknologi, kini bangsa-bangsa di dunia, tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global seperti perubahan iklim (*global climate change*),

food security, energy security, terorisme, human security, kejahatan lintas negara (trans national crime), drug trafficking, maritime security, cyber crime, konflik di kawasan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang diteliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.

Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.⁷Peneliti akan mengumpulkan berbagai data informasi yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Informasi yang mendalam tentang perkembangan globalisasi, disamping tantangan dalam aspek teknologi, kini bangsa Indonesia, tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global seperti

⁷Sandu Siyoto and M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. by Ayup, *Buku Dasar Metodologi*

Penelitian, cet.1 edn (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), hlm.8.

perubahan iklim (*global climate change*), *food security*, *energy security*, terorisme, *human security*, kejahatan lintas negara (*trans national crime*), *drug trafficking*, *maritime security*, *cyber crime*, dan konflik di kawasanl. Adapun posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini tidak untuk menguji sebuah hipotesis sehingga temuan dalam penelitian akan disampaikan sebagai hasil penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi tiga proses; Pertama, dalam menuangkan masalah yang telah dipilih digunakan studi literature tentang pentingnya poros maritim. Kedua, penelitian ini dilanjutkan dengan implementasi model analisis yang dirancang ke dalam sebuah sistem penulisan yang dapat diuji dengan data-data. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan atas keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Data-data yang telah dikumpulkan dilakukan uji keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik intraktif model dan kemudian dideskripsikan dengan kata-kata untuk mengungkapkan suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian nuralistik karena

dilakukan untuk meneliti suatu obyek yang alamaiah.

Lebih lanjut tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang di kumpulkan dari lapangan secara objektif. Penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari peran Indonesia sebagai negara poros maritim dari segi keamanan.

Dalam memilih *sampling*, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mempertimbangkan subyek dan obyek yang dianggap representatif sebagai unit analisis berdasarkan kebutuhan penelitian lenis jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahn (*natural setting*) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahn, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode

penelitian eksperimen, survey dan naturalistik.⁸ Narasumber di pilih dengan pertimbangan dapat dengan tepat menjawab dan mengetahui fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan keamanan negara sebagai poros maritim.

Untuk teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam kepada objek penelitian terkait. Data tambahan diperoleh dengan teknik lain seperti observasi partisipan dan penelusuran dokumen. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Membaca skrip dan literatur yang berkaitan dengan keamanan globalisasi dan perspektif maritim yang dijadikan objek penelitian dengan intensif dan kritis.
2. Melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek dan tujuan penelitian untuk melakukan konfirmasi data dan menemukan data pendukung.
3. Mengidentifikasi data yang berkaitan dengan keamanan poros

maritim serta menemukan hubungan antara globalisasi dan perspektif maritim.

4. Menginventarisasi atau mencatat semua hasil identifikasi data.

Peneliti menggunakan observasi dan wawancara dalam mengumpulkan Wawancara merupakan media untuk mengumpulkan data informasi yang berupa tanya jawab secara lisan antara peneliti dan narasumber. Observasi akan melengkapi proses wawancara. Wawancara merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan data sosial berupa informasi tentang manusia yang akan ditelitinya, termasuk juga peneliti kualitatif. Mengenai “apa” yang dimasalahkan itu. Tentukan terlebih dahulu dan tidak dapat diadakan perubahan pada saat penelitian lapangan berlangsung.⁹

Wawancara ini bersifat open ended yakni peneliti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan lebih bebas memberikan pandangan-pandangan jawaban mereka. Selanjutnya, wawancara kualitatif yakni peneliti melakukan *face-to-face* dengan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet-19th edn (Bandung: Alfabeta, 2013).hlm. 4.

⁹Hardani and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), hlm. 57.

partisipasi atau mewawancarai dengan telepon. Wawancara dilakukan untuk memperdalam data yang ada dilapangan serta data yang diperoleh lebih seimbang. Narasumber yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang memahami permasalahan penelitian, antara lain Pihak-pihak yang diwawancara sebagai narasumber adalah kantor dinas kelautan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Air, dan Angkatan Laut, baik di pusat maupun daerah, Stakeholder yang terkait dengan perairan Indonesia serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Data-data yang didapatkan dari narasumber tersebut adalah data primer, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal artikel serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan dalam tahap pengumpulan data, selanjutnya adalah dilakukan analisa atau pengolahan lebih lanjut dan disajikan sebagai sumber informasi yang akurat¹⁰. Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilaksanakan secara bersamaan pada saat pengumpulan data berlangsung dan

setelah dilakukannya pengumpulan data. Terdapat tiga tahapan proses dalam melakukan analisis atau pengolahan data yakni proses reduksi data, display data, serta proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori interactive model yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldafia.

Hasil dan Pembahasan

Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa, juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa.” Dalam pidato peresmian Lemhannas RI tahun 1965, Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, menegaskan bahwa pertahanan nasional hanya dapat dilaksanakan secara sempurna, bila suatu bangsa mendasarkan pertahanan nasional atas pengetahuan geopolitik tentang Wawasan Nusantara. Pengetahuan geopolitik yang dimaksud adalah

¹⁰John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method*, ed. by

Vicky Knight, 4th ed (London: Sage Publication Ltd, 2018), hlm.7.

geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan tiga faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa. Berdasarkan ketiga hal tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai-nilai kesejarahan yang sudah dimulai sejak era prakolonialisme hingga era kemerdekaan RI. Terdapat permasalahan dalam konteks posisi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, yaitu:

1. Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang keamanan negara poros maritim serta pengawasan yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal keamanan global maritim memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi;
2. Lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai negara maritim dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dari sisi mata laut yang mencakup:

- a. Belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara; ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI;
- b. Belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut; masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut;
- c. Makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia; dan
- d. Masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.

Masalah hukum dalam sektor maritim dan kelautan bersifat multikompleks, mengingat banyaknya sektor lain yang saling terkait. Akibatnya, tumpang tindih pengaturan, bahkan tidak jarang saling berlawanan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Masalah lain terkait dengan banyaknya kasus pencurian ikan. Umumnya lokasi pencurian tersebut berada di wilayah timur Indonesia dan

perairan Pulau Natuna sebagai akibat ketimpangan infrastruktur, terutama armada patroli laut Indonesia. Penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah laut Indonesia mesti dilakukan dengan hati-hati, utamanya tidak melanggar regulasi internasional dan perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga.

Hingga saat ini dirasakan bahwa berbagai permasalahan masih tampak, antara lain belum sepakatnya berbagai pihak tentang pengertian dan lingkup dari keamanan maritim itu sendiri, apa saja ancaman yang memerlukan prioritas penanganan dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang lain, apa saja prioritas yang perlu dibangun dalam hal keamanan maritim, serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal kita membangun keamanan maritim yang tangguh. Ancaman terhadap negara dan bangsa sangat bervariasi, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan berupa ancaman militer dan non-militer, serta berupa ancaman tradisional maupun non

tradisional.¹¹ Penulis menetapkan bahwa yang menjadi lingkup permasalahan dari tulisan ini adalah “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim?” tulisan ini disusun dengan maksud agar berbagai pihak yang memang berkecimpung atau yang berminat didalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan maritim Indonesia, memiliki persepsi yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Namun, pada kenyataannya di Indonesia terdapat 12 (dua belas) instansi yang melakukan penegakan hukum dan peraturan tentang laut secara bersama-sama. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai landasan hukum masing-masing yang isinya hampir bersinggungan. Meski bersinggungan, dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia, sehingga pengamanan dan penegakan hukum belum bias berjalan dengan secara maksimal. Masing-masing instansi dan kementerian terkait mempunyai kebijakan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

¹¹Makmur Supriyatno and Yusuf Ali, *Pengantar Manajemen Pertahanan*, 2018. Hlm. 26.

manusia yang berbeda-beda, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditentukan.¹²

Globalisasi dan Dinamika Ancaman Maritim Indonesia

Terdapat tiga karakter umum globalisasi dalam konteks keamanan internasional, yakni: (1) *New forms of interconnectedness*; (2) *The behavior of new and old power*; dan (3) *New security relations among players*. Globalisasi akan memberikan bentuk hubungan baru antar negara di suatu wilayah karena faktor politik, ekonomi, dan keamanan, selain itu globalisasi akan mempengaruhi perubahan perilaku negara sebagai aktornya. Kebijakan pertahanan dan luar negeri pasti akan berubah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena faktor globalisasi. Dalam hal ini globalisasi akan menuntut tiap negara untuk meningkatkan keamanan wilayahnya, baik dalam skala nasional, regional, dan global.

Dampak globalisasi sangat mempengaruhi arus kegiatan perdagangan dunia di perairan Asia Tenggara, khususnya selat Malaka yang merupakan pintu gerbang masuknya kapal-kapal pengangkut minyak dunia dari Timur Tengah ke kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Tidak kurang 70.000 kapal tiap tahunnya melewati jalur ini, pertumbuhan aktivitas maritim meningkat sebesar 74%, termasuk kenaikan 80% distribusi impor migas dari wilayah Timur Tengah ke Asia Timur. Praktis jalur ini menjadi pintu masuknya berbagai kejahatan maritim yang pada akhirnya berpotensi besar masuk ke wilayah laut Indonesia. “Optimisme publik di bidang maritim juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi di bidang pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pelabuhan serta komitmen mewujudkan negara maritim yang besar dan memperkuat pertahanan maritim”.¹³

Keamanan Nasional Konsep keamanan nasional NKRI dengan jelas

¹²A Kadar, ‘Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’, *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.3 (2015), hlm. 431.

¹³Biro Komunikasi, ‘Survei CSIS: Optimisme Publik Di Bidang Maritim, dalam

<https://maritim.go.id/survei-csis-optimisme-publik-di-bidang-maritim-meningkat/2017> diakses pada 27 November 2020.

dan tegas tercatat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, pemerintah, dengan segenap potensi dan sumberdayanya wajib menjaga keamanan nasional dengan cara:

1. Melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Amanat konstitusi terutama berada di pundak eksekutif guna menjalankan tugas pertahanan negara yang bermakna sebagai menegakan kedaulatan eksternal negara sebagai manifestasi dari ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan militer (*external sovereignty by force*). Selain itu pemerintah bertugas melaksanakan diplomasi dalam masyarakat dunia untuk menjaga *external sovereignty* terutama dalam upayanya mengembangkan *external sovereignty by diplomacy*. maka pemerintah (eksekutif) bertugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Paham komunitarian (timbang balik antara individu dengan

komunitasnya) yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, menunjukkan bahwa konsep bangsa adalah manusia-manusia warga negara Indonesia (*human*). Dengan demikian *people centered security (human security)* dalam konteks Indonesia tidak disebut sebagai keamanan individu atau keamanan insani semata tetapi hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keamanan warga negara sebagai bagian dari keamanan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 80% dari total wilayah Indonesia. Sejatinya Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic states*) keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan diakui tahun 1982 melalui konvensi PBB tentang hukum laut International atau *united nations convention on the law of the sea (UNCLOS)* dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 80% dari total

wilayah Indonesia.¹⁴ Keamanan maritim dipengaruhi oleh tindakan dan pola interaksi antara aktor yang terlibat. Konsep keamanan maritim terletak di antara dua gagasan:

1. kelompok menggunakan kerangka keamanan tradisional,
2. kelompok menggunakan kerangka kerja non-tradisional.

Peran strategis Indonesia dan kesadaran akan pentingnya laut untuk memperbaiki perekonomian merupakan sebuah kebutuhan mendesak bagi Indonesia sehingga membutuhkan konsep keamanan maritim yang akan membawa perekonomian Indonesia kuat. Maritim sendiri merupakan sebuah sistem yang menghubungkan denyut nadi global negara-negara di dunia dan menjadi jalan terpenting dalam kelangsungan perekonomian global. Berdasarkan kepentingan tersebut, posisi strategis Indonesia dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar antara lain:

1. Indonesia sebagai posisi silang yang strategis (*strategic Junction*);

2. Indonesia sebagai lahan perikanan yang strategis (*strategic fishing ground*);
3. Indonesia sebagai potensi bisnis yang strategis (*strategic potential bussiness*) dan;
4. Indonesia sebagai partner kunci yang strategis.

“Poros Maritim Global” adalah visi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa kampanyenya sebagai calon presiden. Visi ini dikemukakan pertama kali pada putaran ketiga debat calon presiden sekitar bulan Juli 2014.¹⁵ Berbagai pihak masih mempunyai pandangan yang beragam tentang pengertian keamanan maritim termasuk lingkup permasalahan yang dihadapinya. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, mencoba merubah sistem kelembagaan multi agent menjadi single agent untuk penegakan hukum di laut Indonesia. Bakorkamla, yang awalnya hanya sebagai koordinator direvitalisasi pada tanggal 8 Desember 2014 menjadi Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) dengan wewenang yang lebih luas sampai

¹⁴Marsetio, *Sea Power Indonesia'* (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2014), hlm. 43.

¹⁵Evan A Laksmana, Iis Gindarsih, and Andrew W Mantong, 'Menerjemahkan Visi Poros Maritim

Global Ke Dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi', 2018, hlm. 2.

dengan kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, karena persoalan utama yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, bukan membuat lembaga baru. Lembaga yang sudah ada memang dijalankan sesuai tupoksi masing-masing dan ini mengindikasikan peran spesifik dari masing-masing lembaga (spesialisasi). Ancaman yang dapat timbul dalam dunia kemaritiman sangat beragam, dan pada umumnya setiap negara atau setiap pihak menetapkan jenis ancamannya secara berbeda, tergantung kepada berbagai faktor yang terkait dengan ancamannya sendiri maupun kerentanan atau *vulnerability* dari pihak yang merasa terancam. *Military threats usually have political objectives (seizure of territory. Change of government of institutions. Manipulation of policy or behavior).*¹⁶Peran spesialisasi inilah yang harus diperkuat melalui fungsi koordinasi. Dalam bagian ini beberapa pandangan yang berbeda tersebut akan disampaikan, selanjutnya dengan dihadapkan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, penulis akan membahas konsep ini agar didapatkan suatu

pengertian keamanan maritim serta cakupannya yang sesuai dengan kepentingan nasional kita tersebut. Pengertian tentang keamanan maritim ini diperlukan sebagai pijakan dalam merumuskan upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun keamanan maritim yang kuat. Dalam pandangan militer pada umumnya, keamanan maritim biasanya difokuskan pada masalah keamanan nasional, dalam upaya melindungi keutuhan wilayah negara dari serangan bersenjata atau penggunaan jenis kekuatan lainnya, serta memproyeksikan kepentingan negara ke wilayah-wilayah lain. Menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, untuk membangun kekuatan laut atau sea power yang kuat, ada beberapa kondisi yang akan sangat berpengaruh terhadap upaya tersebut, yakni (lihat Gambar 4): (i) geographical position atau letak geografis; (ii) physical conformation atau sifat fisik; (iii) extent of territory atau luas wilayah; (iv) number of population atau jumlah penduduk; (v) character of the people atau watak dari penduduk; dan (vi) character of the

¹⁶William T. R. Fox and Barry Buzan, *People, States, and Fear: The National Security Problem in*

International Relations, International Journal, 1985, hlm.76.

government atau watak dari pemerintah.¹⁷

Strategi Pertahanan Maritim Indonesia.

Pada hakikatnya, geopolitik Indonesia merupakan proses hubungan antar bangsa yang sudah terjadi sejak berabad lalu. Proses ini berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong hubungan sosial dan saling ketergantungan antar bangsa, antar negara dan antar manusia semakin besar. Geopolitik yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek dan menjadikan geopolitik sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas (*borderless*), saling tergantung (*interdependency*) dan saling terhubung (*interconnected*) antara satu negara dengan negara lainnya. Sementara itu, dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui

konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Di tengah kuatnya arus globalisasi yang ditandai dengan persaingan global, saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri. Saling ketergantungan dan saling keterhubungan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Era reformasi yang diawali krisis moneter tahun 1998, merupakan bukti kuatnya pengaruh globalisasi terhadap dinamika kehidupan nasional. Sejak era reformasi digulirkan tahun 1998, dari perspektif kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, menjadi ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Di satu sisi, pencapaian ini tentu saja merupakan kemajuan dan prestasi besar bangsa. Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal, bahwa keseharian kehidupan masyarakat telah diwarnai pola pikir, pola sikap dan pola tindak individualistis dan kelompok. Masyarakat luas, dalam berbagai tataran, telah mengadopsi nilai-nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaiannya dengan karakter bangsa.

¹⁷Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, Boston: Little Brown, 1918, hlm.28-29.

Sementara, nilai-nilai luhur bangsa dianggap sebagai nilai lama yang usang dan sudah tidak relevan dengan semangat reformasi yang sarat dengan semangat perubahan. Semangat perubahan telah diartikan secara hitam putih dan bahkan cenderung pragmatis tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkannya. “Bahwa keamanan maritim mengandung empat konsep keamanan, yakni kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*), keselamatan laut atau *marine safety*, ekonomi laut dalam atau *blue economy*, dan keamanan manusia atau *human security*”. Konsep dari kekuatan laut menjelaskan tentang peran angkatan laut, yaitu melindungi keberlangsungan negara, melindungi jalur transportasi laut bagi perdagangan dan peningkatan ekonomi. Konsep keselamatan di laut menjelaskan keselamatan kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya untuk melindungi para profesional dan lingkungan laut. Keamanan maritim juga berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, dimana laut berperan sangat penting dalam perdagangan, dan perikanan. Laut mengandung sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, dan bahan tambang dari dasar lautan.

Ancaman terhadap Kepentingan Nasional di Bidang Maritim Menurut Barry Buzan, ancaman terhadap keamanan negara dapat berbentuk:

1. Ancaman militer, yang berpotensi merusak berbagai komponen negara bahkan negara itu sendiri secara total;
2. Ancaman terhadap ideologi, yang termasuk dalam kategori ancaman berdimensi politik;
3. Ancaman di bidang ekonomi, seperti: embargo, pembatasan ekspor dan impor barang, pencurian sumber daya alam, penghentian pasokan bahan-bahan penting; dan
4. Ancaman di bidang lingkungan atau ekologi, seperti bencana alam, polusi, dan lain-lain.

Kemungkinan ancaman tersebut merupakan potensi yang dapat saja terjadi, namun harus dilihat dari berbagai faktor. Lebih lanjut, Barry Buzan (1983) menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang harus dilihat dalam konteks ancaman tersebut, yakni: (i) sumber ancaman, yang dapat dari dalam negara sendiri, atau dapat berasal dari luar negara; (ii) intensitas ancaman, yang dapat berkisar dari intensitas yang rendah hingga sangat

tinggi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak dari sumber ancaman ke negara kita, jangka waktu datangnya ancaman, dan (iii) kemungkinan atau tingkat probabilitas terjadinya ancaman tersebut. Ancaman yang dapat timbul dalam dunia kemaritiman sangat beragam, dan pada umumnya setiap negara atau setiap pihak menetapkan

jenis ancamannya secara berbeda, tergantung kepada berbagai faktor yang terkait dengan ancamannya sendiri maupun kerentanan atau *vulnerability* dari pihak yang merasa terancam. Hal ini dapat kita lihat pada tabel yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.¹⁸

Tabel 1. Daftar Isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional.

ISU-ISU TRADISIONAL	ISU-ISU NON-TRADISIONAL
1. Ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan beberapa negara di Asia Pasifik.	1. Adanya penyelundupan senjata.
2. Sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.	2. Adanya penyelundupan manusia.
	3. Adanya penyelundupan narkoba.
	4. Perompakan di laut
	5. Illegal fishing.
	6. Separatisme.
	7. Terorisme.
	8. Pencurian kekayaan alam.

Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku Putih Pertahanan 2015).

Penegakan Keamanan Nasional

TNI - Angkatan Laut Indonesia menjadi faktor kedua yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keamanan maritim Indonesia yang kuat. Kemampuan angkatan laut dibangun agar mampu melakukan tiga fungsi sekaligus yakni fungsi militer, fungsi konstabulari, dan fungsi diplomasi. Sebagai salah satu alat perlengkapan Negara dibidang pertahanan dan

keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disingkat TNI AL) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI AL mempunyai tugas dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah

¹⁸Kemenhan RI, *Buku Putih Pertahanan*, 2015.

diratifikasi.¹⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan keaman- nan di laut memiliki dua dimensi, yaitu pe- negakan kedaulatan dan penegakan hukum sehingga dua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain.

Merujuk. Dalam hal melakukan penegakan kedaulatan di laut, maka angkatan laut harus mampu melakukan empat macam pertempuran, yakni pertempuran atas air, pertempuran bawah air, pertempuran amfibi, dan pertempuran khusus. Kekuatan angkatan laut, yang terdiri dari kapal perang, pesawat terbang, marinir dan pangkalan, dalam menyelenggarakan misinya diintegrasikan kedalam suatu sistem senjata yang utuh yang disebut SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Kekuatan tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat mengawasi dan mempertahankan perairan Indonesia yang sangat luas ini.

Geopolitik posisi Indonesia yang strategis bagi kepentingan nasional Negara-negara dunia, menempatkan peran Indonesia yang penting dalam dinamika hubungan Internasional. Dalam era globalisasi, perubahan lingkungan

strategis yang terjadi di kawasan regional dan global sangat berpotensi membawa pengaruh terhadap situasi di Indonesia. Konflik kepentingan yang terjadi di sekitar kawasan dampaknya akan mencapai Indonesia (*spiled over*), baik secara langsung atau tidak langsung (*proxy*). Perebutan sumber daya alam di laut dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional masing-masing Negara sering kali menimbulkan gesekan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai konflik.

Disamping penambahan kekuatan persenjataan dan alutsista, maka sejalan dengan perkembangan ancaman masa kini, penempatan atau penggelaran kekuatan dari unsur-unsur angkatan laut perlu dikaji kembali. Diperlukan pembangunan pangkalan angkatan laut yang canggih dan memadai yang disesuaikan dengan pelaksanaan gelar operasi unsur-unsur angkatan laut. Kekuatan unsur-unsur pemerintah yang mengemban misi penegakan hukum di laut serta menjaga pelestarian lingkungan di lingkungan maritim perlu terus ditingkatkan. Pelanggaran hukum di laut semakin marak, termasuk penangkapan

¹⁹Levina Yustitianiingtyas, 'Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut

Kepulauan Indonesia (ALKI)', *Pandecta: Research Law Journal*, 10.2 (2015), hlm. 144.

ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, penyelundupan manusia, senjata, narkoba, serta barang-barang terlarang lainnya. Dengan luasnya wilayah operasi yang harus diawasi, maka diperlukan peralatan deteksi atau *surveillance* dengan menggunakan teknologi satelit yang canggih, serta kapal-kapal dengan kemampuan dan kecepatan yang tinggi di wilayah perairan dengan kondisi ombak yang tinggi.

Kedua adalah Pembangunan sistem sensor dasar laut dengan menggunakan teknologi *Coastal Acoustic Tomography* (CAT) dengan konsep operasi *Seabed Sonar*. Dijelaskan, *Seabed Sonar* sangat penting dikarenakan karakteristik kolom air yang hanya dapat dieksplorasi oleh sonar yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kapal selam sebagai senjata strategis.

Ketiga, yakni Pembangunan Alur Pelayaran Tol Laut (APTL) dengan tujuan untuk meningkatkan *Maritime Domain Awareness* (MDA). Dimana sasaran APTL adalah untuk mewujudkan keamanan pelayaran antar pelabuhan di seluruh, Indonesia. Serta terdukungnya logistik keseluruhan wilayah, Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Pemanfaatan strategi AS (*Re-balancing Strategy*) dan

strategi Tiongkok (*Strategic Silk Road One Belt One Road*).

Di mana, kedua strategi negara tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan pertahanan.

Peran diplomasi Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai “*unjuk kekuatan Angkatan Laut*” yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu ; pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah Negara dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer

Selain Perang (OMSP).²⁰ Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Pertahanan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari berbagai analisis yang dilakukan didapatkan beberapa temuan atau kesimpulan. Kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim terdiri dari tiga elemen, yakni terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, terjaganya sumber daya kemaritiman serta pelayaran komersial domestik dan internasional, serta tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia. Beberapa ancaman di wilayah perairan Indonesia yang perlu menjadi prioritas utama adalah pembajakan di laut, penangkapan ikan secara ilegal, sengketa wilayah antar negara, penyelundupan narkoba, serta penyelundupan manusia. Adapun unsur-unsur yang menjadi lingkup dari keamanan maritim Indonesia adalah kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, laut yang bebas dari pelanggaran hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta keamanan dan kelestarian sumber daya maritim. Menjaga keutuhan Indonesia dengan

kemajemukannya, upaya atas integrasi nasional harus menjadi salah satu agenda utama dalam konteks kepemimpinan nasional, dengan mengedepankan *pro bono publico*. *Pro bono publico* menurut Webster Dictionary “*being, involving, or doing professional and especially legal work donated especially for the public good.*” Dalam pengertian yang lebih Indonesia adalah tanpa pamrih. Tanpa pamrih dalam mengelola kemajemukan, yakni kemampuan untuk bisa memadukan semua golongan, ras, dan agama, serta dapat menyatukan perbedaan dalam keharmonisan. Hal ini terutama di kalangan elit yang berdasarkan aspek kesejarahan Indonesia justru menjadi aktor yang digunakan oleh negara besar baik elit yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara. Hal inilah yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara maritim yang disegani oleh negara lain.

Rekomendasi. Direkomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk untuk dilakukan kajian khusus tentang Strategi Pertahanan Laut mengenai masalah globalisasi Maritim ini, setidaknya hal berikut ini yaitu

²⁰Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, ‘Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI’, 2004. Hlm. 6.a

Pembuatan roadmap/blueprint Maritim Dunia sebagai geopolitik Indonesia, Analisa kebijakan pembangunan karakter nasional yang berwawasan maritime, Analisa kebijakan pembangunan prasarana pelabuhan laut yang komprehensif, Analisa kebijakan penggelaran kekuatan laut yang meningkatkan daya tangkal, Analisa keamanan regional di Indo-Pasifik, terutama dari aspek geopolitik. Hal di atas, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik untuk kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Kadar, Abdul. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional*, hlm. 431.
- Laksmana, Evan. A., Gindarsih, Iis., & Mantong, Andrew. W. (2018). *Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi*. Hlm. 2.
- Fox, William. T. R., & Buzan, Barry. (1985). People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations. In *International Journal* (Vol. 40, Issue 4). Hlm. 76.
- Yustitiningtyas, Levina. (2015). Pengamanan dan Penengakan

Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Pandecta: Research Law Journal*, 10(2), hlm. 144.

Buku

- Creswell, John. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method* (V. Knight (ed.); 4th ed). SAGE Publication Ltd, hlm. 7.
- Darto, Harmoko. (2016). *The Potpourri of Regional History: Tracing the History of Maritime History on the North Coast of Central Java*, hlm. 9.
- Hardani, Andriani, Helmina., Auliya, Nur. Hikmatul., Fardani, Rhousandy. Asri., Ustiawaty, Jumari., Utami, Evi. Fatmi., Sukmana, Dhika, Juliana., & Istiqomah, Ria, Rahmatul. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1, Issue March). CV. Pustaka Ilmu Grup, hlm. 57.
- Marsetio. (2014). "Sea Power Indonesia". (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2014), hlm. 43
- Mahan, Alfred, Thayer. (1918). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, hlm. 28-29.
- Siyoto, Sandu., & Sodik, M. Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. In Ayup (Ed.), *buku dasar metodologi penelitian* (cet.1 ed.). Literasi Media Publising, hlm. 8.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cet-19th ed.). Alfabeta.
- Supriyatno, Makmur., & Ali, Yusuf. (2018). *Pengantar Manajemen Pertahanan*, Hlm. 26.
- Wahyudi, Bambang. (2018). **KEPEMIMPINAN NASIONAL**

DALAM PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS. PALAR |
PAKUAN LAW REVIEW, hlm. 327.

Undang-Undang

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015). *Buku Putih Pertahanan*, hlm. 5.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2004). *Undang undang no 34 tahun 2004 tentang TNI*, hlm. 6.

Internet

Biro Komunikasi. (2017). *Survei CSIS: Optimisme Publik di Bidang Maritim Meningkat*.

<https://maritim.go.id/survei-csis-optimisme-publik-di-bidang-maritim-meningkat/>, 18 September 2017, diakses pada 27 November 2020.

Tamburian, Elfatha. Gloria. V. G. (2019). *Dharma Samudera Dalam Perspektif Maritim di Era Globalisasi*. Dalam <https://www.gesuri.id/analisis/dharma-samudera-dalam-perspektif-maritim-di-era-globalisasi-b1VY4Zhnn>, 15 Januari 2019, diakses pada 30 November 2020.

